PEMENUHAN ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN (TIDAK DISKRIMINATIF) DALAM PELAYANAN PUBLIK BAGI PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
AUFA KIRANA NAFILATI, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

THE APPLICATION OF EQUAL TREATMENT PRINCIPLE (NON-DISCRIMINATIVE FOR BADAN PELAKSANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PATIENTS OF PUBLIC SERVICE BY PKU MUHAMMADIYAH HOSPITAL YOGYAKARTA

ABSTRACT

By:
Aufa Kirana Nafilati* and Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H, LL.M.**

The objective of this research is to investigate the application of equal treatment principles (non-discriminative) for JKN-BPJS Kesehatan patients in PKU Muhammadiyah hospital Yogyakarta.

This is an analytical descriptive research which aims to obtain direct field observation related to the application of equal treatment for BPJS Kesehatan patients. An empirical approach has been used to relate the regulation with its application known as *das sollen* and *das sein* principle. Direct field observation (primary data collection) was conducted through interviews. In addition, secondary data collection was also carried out by literature studies.

The results show that the application of equal treatment principle for general JKN-BPJS Kesehatan patients have been implemented well in PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta. However, it should be emphasized that there are a number of differences between JKN-BPJS patients and paying patients in the same treatment class. This occurs due to government policies which limits JKN-BPJS patients in terms of: (1) health service cost and (2) medicine selection. There are several suggestions that may improve JKN-BPJS service which includes: (1) continuous socialization of JKN-BPJS program to the public especially related to the rights and duty of JKN-BPJS patients (2) continuous evaluation to the implementation of JKN-BPJS program has to be conducted both by the hospital and BPJS in order to improve their service to the public (3) eventually, continuous improvement of JKN-BPJS program through participation of all parties (hospital, BPJS and patients) is needed to optimize public health service in Yogyakarta.

Keys: National treatment (non-discrimination), Public Service, JKN – BPJS Kesehatan, Yogyakarta

* Student of Administrative Law on Laws Study Program, Faculty of Law UGM
** Lecturer of Administrative Law, Faculty of Law UGM

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PEMENUHAN ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN (TIDAK DISKRIMINATIF) DALAM PELAYANAN PUBLIK BAGI PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
AUFA KIRANA NAFILATI, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PEMENUHAN ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN (TIDAK DISKRIMINATIF) BAGI PASIEN BADAN PELAKSANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

INTISARI

Oleh:
Aufa Kirana Nafilati* dan Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan asas persamaan perlakuan (tidak diskriminatif) bagi pasien BPJS Kesehatan dalam pelayanan publik di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung di lapangan sejauh mana pemenuhan asas persamaan perlakuan (tidak diskriminatif) bagi pasien BPJS Kesehatan dalam pelayanan publik di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan pendekatan empiris bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen* dan *das sein*, yang dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sebagai penunjang. Sarana yang digunakan dalam pengumpulan data primer dengan pedoman wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder dengan studi dokumen.

Analisis menunjukkan pemenuhan hak pasien umum dan pasien JKN – BPJS oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta secara umum sudah sesuai dengan asas persamaan perlakuan (tidak diskriminatif), namun apabila dibandingkan dengan hak pasien umum, terdapat beberapa hak yang tidak dimiliki oleh pasien JKN – BPJS. Hal ini karena faktor adanya kebijakan pemerintah, di antaranya: (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan; dan (2) Pemilihan obat. Perbaikan kebijakan pelayanan kesehatan JKN – BPJS dalam upaya meningkatkan tingkat pemahaman pasien JKN – BPJS mengenai hak-hak yang dimilikinya di antaranya yaitu pertama, perencanaan yang matang terhadap program yang fokus terhadap upaya meningkatkan tingkat pemahaman pasien JKN – BPJS mengenai hak-hak yang dimilikinya, kedua yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan program yang fokus terhadap JKN – BPJS sehingga tujuan pelayanan kesehatan dapat dioptimalkan, ketiga adalah kontinuitas program, terkait dengan program-program yang berjalan dengan efektif dapat dipertahankan kontinuitasnya sehingga di tahun-tahun berikutnya dapat terus berjalan sehingga upaya meningkatkan pemahaman pasien JKN – BPJS mengenai hak-hak yang dimilikinya dapat berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Asas Persamaan Perlakuan (Tidak Diskriminatif), Pelayanan Publik, JKN – BPJS, Kota Yogyakarta

---

* Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UGM
** Dosen pada Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM